

KINERJA KEUANGAN DAERAH: PENERIMAAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH)

Deden Edwar Yokeu Bernardin¹, Wiwit Dwi Agustin², Yanisa Zahra Nurul Fitria³

¹Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, aden@ars.ac.id

²Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, wiwitdwiagustin97@gmail.com

³Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, yanisazahranf@ars.ac.id

ABSTRAK

Untuk mewujudkan kemampuan keuangan yang baik, maka daerah harus mampu mengenali sumber kekayaan yang dimilikinya. Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan indikator penting dalam peningkatan kinerja keuangan. Locus penelitian ini di Kota Bandung untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah, dengan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif dan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD, lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD, secara simultan berpengaruh signifikan. PAD mampu memediasi pengaruh hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap kinerja keuangan daerah namun tidak signifikan. Secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan secara simultan berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: Sumber Kekayaan; PAD (Pendapatan Asli Daerah); Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

To realize good financial capacity, the region must be able to recognize the source of its wealth. The source of PAD (District Own Source Revenue) is an important indicator in improving financial performance. The locus of this research is in the city of Bandung to examine the effect of local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management and other legitimate PAD on PAD and their impact on district financial performance, using a quantitative approach with descriptive verification methods and path analysis. The results of this study indicate that individually local taxes, regional levies and the results of regional wealth management that are separated have no significant effect on PAD, other legitimate PAD has a significant effect on PAD, simultaneously has a significant effect. PAD is able to mediate the influence of the relationship between local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management and other legitimate PAD on district financial performance but not significant. Partially local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management and other legitimate PAD have no significant effect on district financial performance, PAD has a significant effect on district financial performance and simultaneously has a significant effect.

Keywords: *Source of Wealth; PAD (District Own Source Revenue); Financial Performance;*

PENDAHULUAN

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah bagian dari APBD yang dapat dibuat sebagai bahan acuan untuk mengetahui baik buruknya kemampuan keuangan daerah. Peningkatan PAD harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah supaya dapat mendanai keperluan daerahnya secara mandiri, sehingga tingkat bergantungnya pemerintah daerah pada pemerintah pusat bisa menurun dan akhirnya daerah bisa berdiri sendiri (Bernardin, 2017). PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah mampu memberikan sumbangan terhadap tingkat kinerja keuangan. Kemampuan keuangan suatu daerah bisa dibilang efektif jika wujud pendapatan asli daerah lebih besar dibanding target yang ditentukan (Sari & Mustanda, 2019). Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan guna menanggung sebagian belanja pengeluaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Bernardin & Sofyan, 2018).

Kinerja keuangan adalah sebagai alat ukur kinerja dengan menggunakan parameter keuangan. Pengerjaan analisis kinerja keuangan pada umumnya dikerjakan untuk mengevaluasi kemampuan sebelumnya dengan menggunakan berbagai macam analisis (Apridiyanti, 2019). Kinerja keuangan bisa dilihat dengan cara bagaimana pemerintah daerah mampu menggali potensi daerah untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan PAD pada setiap tahunnya (Prastiwi & Aji, 2020). Salah satu rasio keuangan yang dipergunakan untuk pengukuran kinerja keuangan daerah yaitu menggunakan rasio desentralisasi fiskal yaitu total PAD dibagi total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam peningkatan PAD untuk mendanai pembangunan dan menggambarkan peran pemerintah pusat dalam membangun daerah yang mana akan menunjukkan seberapa siap pemerintah daerah untuk melakukan

otonomi daerah, Purba dan Hutabarat dalam (Yulitiawati & Mustika, 2020).

Pada tahun 2020 tepatnya triwulan kedua, mewabahnya Covid-19 yang dideklarasikan oleh WHO sebagai wabah dunia yang telah memberikan risiko terhadap keselamatan masyarakat Indonesia serta memberikan dampak yang besar terutama pada sektor perekonomian, Sudaryanto dalam (Suryana et al., 2021). Dengan keberadanya wabah yang menyerang Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan berbagai usaha dalam rangka menangani Covid-19, salah satunya dengan mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang membahas mengenai percepatan penanganan Covid-19 tersebut. Terbitnya UU tersebut telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan anggaran dengan adanya perubahan dalam hal realokasi dan *refocusing* anggaran (Rabbani, 2020). Pemerintah daerah di Indonesia melakukan realokasi APBD dan *refocusing* anggaran untuk menangani Covid-19. Menteri Keuangan memberitahukan bahwa pemerintahan hendak melaksanakan *refocusing* anggaran sebesar Rp 26,2 triliun guna melengkapi kebutuhan dalam penindakan pandemi Covid-19 serta perbaikan ekonominya (Rohardian & Jaeni, 2022).

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu realokasi dan *refocussing* anggaran, diharapkan pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran dan keuangan daerah, Onibala dalam (Vebiani et al., 2022). APBD perubahan Kota Bandung tahun 2020 nilainya menurun cukup tajam hingga Rp 1 triliun. Yang awalnya APBD murni dari pendapatan Kota Bandung ditargetkan mencapai Rp 7,1 triliun, tapi pada APBD perubahan hanya Rp 6,035 triliun (Rohardian & Jaeni, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Kinerja Keuangan Daerah: Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)”**.

**KAJIAN LITERATUR
PAD**

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah yang ditetapkan dengan aturan yang telah ditetapkan, dimana PAD dibagi menjadi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah (Dewata et al., 2021).

Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018:14) pengertian "Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Retribusi Daerah

Menurut (Khusaini, 2018:148) "Retribusi daerah merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan mendapat prestasinya kembali secara langsung".

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan adalah Penerimaan daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Kireina & Octaviani, 2021).

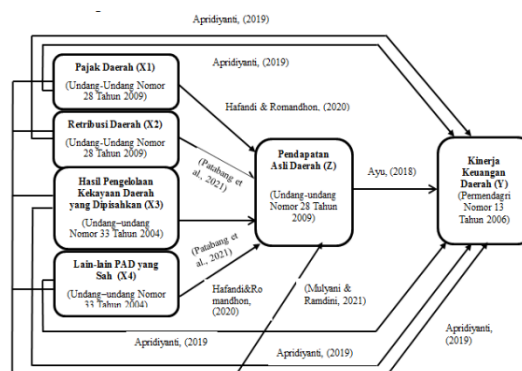
Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, Abdul dalam (Mulyani & Ramdini, 2021).

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun dalam (Azhar, 2021) "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu gambaran mengenai tingkat capaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan kegiatan program kebijakan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah".

Kerangka Pemikiran



**Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran**

Sesuai fenomena, kajian teori, dan kerangka pemikiran di atas, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak daerah di Kota Bandung baik
2. Pendapatan Retribusi daerah di Kota Bandung baik
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kota Bandung baik
4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di Kota Bandung baik
5. Pendapatan PAD di Kota Bandung baik
6. Pendapatan Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung baik
7. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung
8. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung
9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung
10. Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung
11. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
12. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
13. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh

- signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
14. Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
 15. PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
 16. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
 17. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
 18. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap PAD dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
 19. Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PAD dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
 20. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung
 21. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung
 22. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PAD dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder ini menggunakan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2021, yang diperoleh dari BPKAD Kota Bandung. Populasi pada analisis ini

adalah Laporan Realisasi APBD Kota Bandung. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2021 dengan metode *purposive sampling* untuk teknik pengambilan data yang diperlukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Tekniknya menggunakan Uji statistik, diantaranya adalah:

1. Analisis Data

Analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis deskriptif dengan cara menghitung efektivitas yaitu membandingkan antara realisasi dengan target. Analisis verifikatif yang digunakan adalah uji asumsi klasik diantaranya: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

2. Analisis Jalur

Ada 2 persamaan analisis jalur yaitu:
$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKDYD + \beta_4 LLPADYS + e_1(1)$$
$$\text{Kinerja Keuangan Daerah} = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKDYD + \beta_4 LLPADYS + e_2(2)$$

3. Uji Intervening

Penelitian ini menggunakan Uji Sobel untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsung dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan *Calculation for the Sobel Test* dengan kaidah keputusan yaitu, jika *sobel test statistic* $\geq 1,96$ dengan signifikan 5%, maka variabel tersebut dapat dikatakan mampu memediasi antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2018).

4. Uji T
Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara individual dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan uji t parsial menurut (Sugiyono, 2019) adalah sebagai berikut:
 - a. Jika Sig *thitung* > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.
 - b. Jika Sig *thitung* < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
5. Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel

terikat. Dasar pengambilan keputusan uji f menurut (Sugiyono, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Jika F hitung > F tabel (sig. > 0,05) maka dikatakan berpengaruh signifikan.
- b. Jika F hitung < F tabel (sig. < 0,05) maka dikatakan berpengaruh tidak signifikan.

PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Berikut adalah hasil uji analisis statistik deskriptif:

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

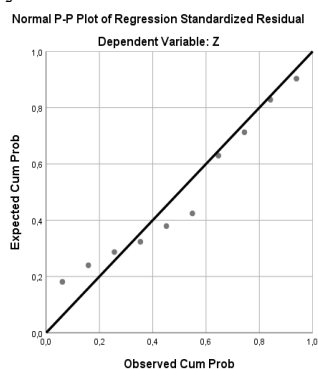
Tahun	X1		X2		X3		X4		Z		Y	
	PD	Predikat	RD	Predikat	HPKDYD	Predikat	LLPADYS	Predikat	PAD	Predikat	KKD	Predikat
2012	112,87	Sangat Efektif	110,5	Sangat Efektif	70,38	Tidak Efektif	79,01	Kurang Efektif	107,67	Sangat Efektif	27,42	Cukup
2013	112,33	Sangat Efektif	114,57	Sangat Efektif	63	Tidak Efektif	53,88	Tidak Efektif	102,49	Sangat Efektif	33,3	Sedang
2014	99,97	Cukup Efektif	75,63	Kurang Efektif	48,84	Tidak Efektif	80,52	Kurang Efektif	94,89	Cukup Efektif	34,64	Sedang
2015	93,5	Cukup Efektif	60,42	Tidak Efektif	43,01	Tidak Efektif	85,7	Kurang Efektif	90	Cukup Efektif	36,48	Sedang
2016	78,2	Kurang Efektif	44,93	Tidak Efektif	53,29	Tidak Efektif	95,53	Cukup Efektif	77,79	Kurang Efektif	37,87	Sedang
2017	90,62	Cukup Efektif	19,06	Tidak Efektif	56,4	Tidak Efektif	102,69	Sangat Efektif	85,5	Kurang Efektif	44,96	Baik
2018	81,7	Kurang Efektif	30,06	Tidak Efektif	16,1	Tidak Efektif	72,64	Tidak Efektif	75,69	Kurang Efektif	43,29	Baik
2019	84,2	Kurang Efektif	44,57	Tidak Efektif	13,09	Tidak Efektif	67,76	Tidak Efektif	78,35	Kurang Efektif	40,24	Baik
2020	93,03	Cukup Efektif	84,35	Kurang Efektif	47,35	Tidak Efektif	87,1	Kurang Efektif	91,12	Cukup Efektif	36,57	Sedang
2021	93,72	Cukup Efektif	43,29	Tidak Efektif	83,54	Kurang Efektif	88,81	Kurang Efektif	91,14	Cukup Efektif	37,61	Sedang

Sumber: Laporan Anggaran APBD Kota Bandung, data diolah 2022

2. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatifnya menggunakan uji asumsi klasik yaitu:

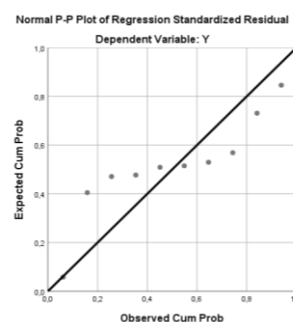
- a. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas pada penelitian ini yaitu:



Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Struktur 1

Menurut gambar 2 di atas diperoleh bahwa data dengan Normal *P-P Plot* pada struktur 1 dinyatakan berdistribusi normal atau mendekati normal.



Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Struktur 2

Menurut gambar 3 diatas diperoleh bahwa data dengan Normal *P-P Plot* pada struktur 2 dinyatakan berdistribusi normal atau mendekati normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Struktur 1

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,149	6,724
X2	,445	2,247
X3	,160	6,243
X4	,359	2,789

a. Dependent Variable: Z

Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Menurut tabel 3 diatas diperoleh bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas hal ini dikarenakan nilai *tolerance* berada diantara 0,00-1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) <10.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas Struktur 2

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,129	7,775
X2	,390	2,566
X3	,151	6,641
X4	,110	9,101
Z	,136	7,373

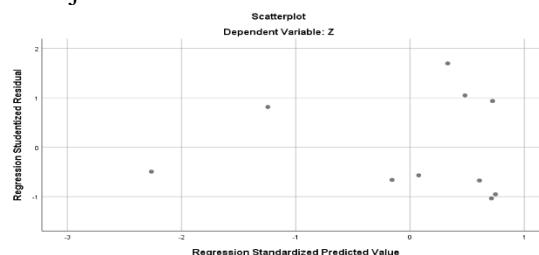
a. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Menurut tabel 4 diatas diperoleh bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas hal ini dikarenakan nilai *tolerance* berada

diantara 0,00-1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) <10.

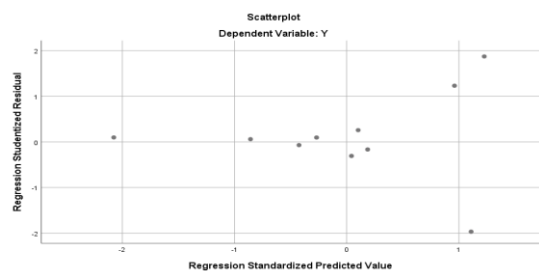
c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Struktur 1

Menurut gambar 4 diatas diperoleh bahwa plot (titik-titik) tidak membentuk pola dan menyebar sehingga diartikan semua variabel tidak mengalami heteroskedastisitas.



Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Struktur 2

Menurut gambar 5 diatas diperoleh bahwa plot (titik-titik) tidak membentuk pola dan menyebar sehingga diartikan semua variabel tidak mengalami heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Struktur 1 Model Summary^b

Model	R	Durbin-Watson
1	,930 ^a	1,448

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Z

Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Menurut tabel 5 diatas diperoleh bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) yaitu 1,448 dan diantara 1 dan 3 sehingga dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi Struktur 2 Model Summary^b

Model	R	Durbin-Watson
1	,975 ^a	1,878

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X3, X1, X4

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolah data SPSS 25 (2022)

Menurut tabel 6 diatas diperoleh bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) yaitu 1,878 dan diantara 1 dan 3 sehingga dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Intervening

Berikut adalah hasil uji statistik:

Pengaruh Langsung

- a. Pajak daerah (X1) terhadap kinerja keuangan daerah (Y)

$$\rho_{YX1} = 0,142$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar 14,2%.

- b. Retribusi daerah (X2) terhadap kinerja keuangan daerah (Y)

$$\rho_{YX1} = -0,151$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar -15,1% artinya jika retribusi daerah naik maka kinerja keuangan daerah turun, dan begitu juga sebaliknya.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) terhadap kinerja keuangan daerah (Y)

$$\rho_{YX1} = -0,167$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar -16,7% artinya jika hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik maka kinerja keuangan daerah turun, dan begitu juga sebaliknya.

- d. Lain-lain PAD yang sah (X4) terhadap kinerja keuangan daerah (Y)

$$\rho_{YX1} = -0,467$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar -46,7% artinya jika lain-lain PAD yang sah meningkat maka kinerja keuangan daerah menurun, begitu juga sebaliknya.

- e. PAD (Z) terhadap kinerja keuangan daerah (Y)

$$\rho_{YX1} = 1,300$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar 130%.

Pengaruh tidak langsung

- a. Pajak daerah melalui PAD terhadap kinerja keuangan daerah
 $\rho_{ZX1} \times \rho_{YZ} = 0,377 \times 1,300 = 0,490$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah melalui PAD adalah sebesar 49%.

- b. Retribusi daerah melalui PAD terhadap kinerja keuangan daerah
 $\rho_{ZX2} \times \rho_{YZ} = 0,208 \times 1,300 = 0,270$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah melalui PAD adalah sebesar 27%.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui PAD terhadap kinerja keuangan daerah

$$\rho_{ZX3} \times \rho_{YZ} = -0,232 \times 1,300 = -0,301$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempengaruhi kinerja keuangan daerah melalui PAD sebesar 30,1%

- d. Lain-lain PAD yang sah melalui PAD terhadap kinerja keuangan daerah

$$\rho_{ZX3} \times \rho_{YZ} = 0,925 \times 1,300 = 1,202$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah mempengaruhi kinerja keuangan daerah melalui PAD sebesar 120%.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh 0,377 terhadap PAD. Nilai signifikansi 0,417 > 0,05 maka Pajak Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika pajak daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah tidak akan meningkat. Pajak Daerah memiliki dampak yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah atau berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh 0,208 terhadap PAD. Nilai signifikansi 0,438 > 0,05 artinya Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah atau berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh - 0,232 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi 0,597 > 0,05 artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah atau berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap PAD di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh 0,925 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi 0,020 < 0,05 artinya Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh yang kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika penerimaan Lain-lain PAD yang Sah meningkat maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh 0,142 terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Nilai signifikansi 0,673 > 0,05 artinya Pajak Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Artinya Pajak Daerah memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap Kinerja Keuangan Daerah atau berbanding terbalik dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh - 0,151 terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Nilai signifikansi 0,447 > 0,05 artinya Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap Kinerja Keuangan Daerah atau berbanding terbalik dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan berpengaruh -0,167 terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Nilai signifikansi $0,593 > 0,05$ artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap Kinerja Keuangan Daerah atau berbanding terbalik dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh -0,467 terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Nilai signifikansi $0,239 > 0,05$ artinya Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap Kinerja Keuangan Daerah atau berbanding terbalik dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung

Hasil perolehan membuktikan bahwa PAD berpengaruh 1,300 terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Artinya, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Suatu daerah dapat dikatakan menyelenggarakan desentralisasi dengan baik karena dapat menopang keperluan pemerintahan dengan hasil Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung

Menurut hasil uji statistik memperlihatkan bahwa total pengaruh dari keseluruhan variabel adalah sebesar 4,227 dan memiliki nilai sisa -3,227. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh Terhadap PAD dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Bandung, maka H_0 ditolak.

Menurut hasil uji *sobel test* pada uji jalur 1,2 dan 3 memperlihatkan bahwa tidak signifikan artinya PAD tidak mampu memediasi variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan uji jalur 4 menyatakan signifikan yang artinya Pendapatan Asli Daerah mampu memediasi variabel bebas dan variabel terikat. Artinya dari hasil uji *sobel test* terbanyak pada uji jalur tersebut menyatakan tidak signifikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis pajak daerah menyatakan bahwa kondisi realisasi pajak daerah di Kota Bandung baik, maka sesuai dengan hipotesis.
2. Analisis retribusi daerah menyatakan bahwa kondisi realisasi retribusi daerah di Kota Bandung tidak baik, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
3. Analisis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menyatakan bahwa kondisi realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Bandung tidak baik, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
4. Analisis lain-lain PAD yang sah menyatakan bahwa kondisi realisasi lain-lain PAD yang sah di Kota Bandung tidak baik, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
5. Analisis pendapatan asli daerah menyatakan bahwa kondisi realisasi pendapatan asli daerah di Kota Bandung baik, maka sesuai dengan hipotesis.
6. Analisis kinerja keuangan daerah yang diprosikan dengan derajat

- desentralisasi fiskal menyatakan bahwa kondisi rasio derajat desentralisasi fiskal di Kota Bandung sedang atau dikatakan baik, maka sesuai dengan hipotesis.
7. Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya jika pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah tidak langsung ikut meningkat, penerimaan pendapatan asli daerah bisa saja tetap atau menurun, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 8. Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya jika retribusi daerah meningkat maka pendapatan asli daerah tidak langsung ikut meningkat, penerimaan pendapatan asli daerah bisa saja tetap atau menurun, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 9. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat maka pendapatan asli daerah tidak langsung ikut meningkat, penerimaan pendapatan asli daerah bisa saja tetap atau menurun, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 10. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat, maka sesuai dengan hipotesis.
 11. Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, artinya jika pajak daerah meningkat maka kinerja keuangan daerah tidak langsung ikut meningkat bisa saja tetap atau menurun, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 12. Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, artinya jika retribusi daerah meningkat maka kinerja keuangan daerah tidak langsung ikut meningkat bisa saja tetap atau menurun, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 13. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat maka kinerja keuangan daerah tidak langsung ikut meningkat bisa saja tetap atau menurun, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 14. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, artinya jika lain-lain PAD yang sah meningkat maka kinerja keuangan daerah tidak langsung ikut meningkat bisa saja tetap atau menurun, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 15. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya jika pendapatan asli daerah meningkat maka kinerja keuangan daerah juga ikut meningkat, maka sesuai dengan hipotesis.
 16. Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan berdampak terhadap kinerja keuangan daerah, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 17. Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan berdampak terhadap kinerja keuangan daerah, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 18. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka tidak sesuai dengan hipotesis.
 19. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan berdampak terhadap kinerja keuangan daerah, maka sesuai dengan hipotesis.
 20. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka sesuai dengan hipotesis.
 21. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, maka sesuai dengan hipotesis.

22. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah di Kota Bandung, maka tidak sesuai dengan hipotesis.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk perusahaan yang diteliti
Berdasarkan hasil penelitian ini pada BPKAD Kota Bandung, maka diharapkan kepada Pemerintahan Kota Bandung untuk terus memaksimalkan sumber dari pendapatan asli daerahnya dan sebagai bahan acuan, baik untuk pemerintah daerah maupun pembuat kebijakan, agar dapat menjaga kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam menyesuaikan rancangan kerja di daerah secara menyeluruh.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti yang akan datang dapat menggantikan variabel yang lain terkait dengan APBD misalnya Dana Perimbangan, DAU, DAK dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah untuk memperoleh temuan terbaru yang lebih bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32–41.
<https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>
- Azhar, I. (2021). *PENGARUH*

PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA. *September 2021*, 164–174.

- Bernardin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Ekspansi*, 9(1), 19–35.
- Bernardin, D. E. Y., & Sofyan, I. (2018). The Influence of Hotel Taxes and Entertainment Taxes toward District Own Source Revenue in Bandung City. *Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP 2017)*, 1(1), 67–72.
<https://doi.org/10.5220/0007076900670072>
- Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(4), 80–98.
<https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivarianate dengan Program IBM SPSS 21*, Universitas Diponegoro Semarang.
www.undip.ac.id.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang UB Press.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

- Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Rabbani, D. R. S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif*, 4(1), 59–78.
- Rohardian, P., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(1), 236–258.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sugiyono. (2019). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, N. A., Putra, S. S., & Rosmiati, M. (2021). Review Alokasi pada Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2020. *Indonesian Accounting ...*, 1(3), 405–414.
- Vebiani, D., Nugraha, & Hardiana, R. D. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID- 19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)*. 1(1).
- Yulitiawati, & Mustika, A. (2020). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (Dscr) dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 – 2017. *Jetap*, 1(1), 67–79.

BIODATA PENULIS

Deden Edwar Yokeu Bernardin salah satu Dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi ARS University Bandung. Tertarik dalam melakukan penelitian ilmu Akuntansi.

Wiwit Dwi Agustin lahir di Bojonegoro 12 Agustus 1997, Lulusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi ARS University Bandung Akuntansi. Tertarik dalam melakukan penelitian ilmu Akuntansi.

Yanisa Zahra Nurul Fitria salah satu Dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi ARS University Bandung.